



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725-7054414
Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-mail : kehutan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 903/407/KPH/PS-2023

TENTANG

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN OPTIMALISASI FUNGSI DAN
DAYA DUKUNG WILAYAH DAS

PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH
KABUPATEN/KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sumatera Barat telah disusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+*) Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2013;
 - bahwa Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation / REDD+*) dapat diketahui secara lebih akurat dengan melakukan pengukuran ulang potensi cadangan karbon pada Petak Ukur Permanen Re-enumerasi pada kawasan hutan berbasis Daerah Aliran Sungai yang dikelola oleh KPH, PS maupun PBPH;
 - bahwa dengan pertimbangan huruf (b) di atas telah dialokasikan anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi Dan Daya Dukung Wilayah DAS melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 pada Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut pada huruf (c) di atas dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nation Frame Work Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan Dan Verifikasi Aksi Dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
18. Keputusan Kepala Badan Standarsisasi Nasional Nomor 187/KEP/BSN/11/2011 tanggal 18 Nopember 2011 tentang Pengukuran dan Penghitungan Cadangan Karbon – Pengukuran Lapangan untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan (ground based forest carbon accounting) dan Penyusunan Persamaan Alometrik untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan Berdasar Pengukuran Lapangan (ground based forest carbon accounting) SNI : 7724 :11 dan SNI : 7725 : 11;
19. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Nomor P.01/VIII-P3KR/2012 tentang Pedoman Penggunaan Model Alometrik untuk Pendugaan Biomassa Stok Karbon Hutan di Indonesia;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Provinsi untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/SRAP REDD+) Sumatera Barat;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022

perhatikan :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/ 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PELAKSANAAN SUB KEGIATAN OPTIMALISASI FUNGSI DAN DAYA DUKUNG WILAYAH DAS PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU** : Melaksanakan Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS pada Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Tahun 2023.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Jadwal Pelaksanaan, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Kode Rekening 3.028.06.1.01.02.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI U.P. S.Hut. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera di Padang.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip.

KERANGKA ACUAN KERJA

Satuan Kerja	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Nomor DPA – SKPD	: DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2023
Sub Kegiatan	: 3.28.06.1.01.02 - Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
Kegiatan	: 3.28.06.1.01 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Program	: 3.28.06 - Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Masukan	: Tersedianya dana Rp. 400.000.000,- dan SDM
Keluaran	: Jumlah Petak Ukur Permanen yang terbangun dan terenumerasi (8 petak); dan monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan yang tersusun (10 KPH).
Hasil	: Terlaksananya Pengelolaan DAS di wilayah kelola KPH
Kel.Sasaran Kegiatan	: Daerah Aliran Sungai di Sumatera Barat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu perubahan iklim global telah menjadi isu sentral dan perhatian semua kalangan baik nasional maupun internasional. Salah satu upaya mengurangi emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh karbon (CO²) adalah dengan mempertahankan atau meningkatkan serapan cadangan karbon serta meningkatkan populasi tumbuhan terutama di dalam kawasan hutan.

Provinsi Sumatera Barat dengan luas kawasan hutan mencapai luas ± 2,3 juta hektar tentunya ikut mempengaruhi intensitas emisi gas rumah kaca yang dihasilkan serta memberikan sumbangsih dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Cadangan karbon yang telah diserap oleh tumbuhan kayu maupun tumbuhan bawah di dalam kawasan hutan maupun karbon yang tidak dilepaskan dalam tumbuhan mati dan serasah perlu dilakukan pengukuran secara lengkap, akurat dapat terukur. Hal ini diperlukan agar kita dapat mengetahui potensi karbon di Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pengendalian perubahan iklim maupun dalam rangka perdagangan karbon (carbon trade).

Untuk itu pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan biaya Pembuatan Petak Ukur Permanen dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim pada Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2022 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS dimaksudkan sebagai gambaran dan arahan pelaksanaan Pembuatan Petak Ukur Permanen dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim di tahun 2023.

2. Tujuan
Agar pelaksanaan Pembuatan Petak Ukur Permanen dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dapat terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel.

C. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nation Frame Work Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan Dan Verifikasi Aksi Dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
18. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 187/KEP/BSN/11/2011 tanggal 18 Nopember 2011 tentang Pengukuran dan Penghitungan Cadangan Karbon – Pengukuran Lapangan untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan (ground based forest carbon accounting) dan Penyusunan Persamaan Alometrik untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan Berdasar Pengukuran Lapangan (ground based forest carbon accounting) SNI : 7724 :11 dan SNI : 7725 : 11;
19. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Nomor P.01/VIII-P3KR/2012 tentang Pedoman Penggunaan Model Alometrik untuk Pendugaan Biomassa Stok Karbon Hutan di Indonesia;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Provinsi untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/SRAP REDD+) Sumatera Barat;

23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022.

D. Sasaran

Sasaran sub kegiatan terdiri dari Re-enumerasi Petak Ukur Permanen (PUP) dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (PDPI).

RENCANA PELAKSANAAN

A. Pendanaan

Biaya Pelaksanaan Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Tahun 2023 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus jutaan rupiah) dialokasikan melalui DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2023 sumber dana APBD.

B. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor : DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2022 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Barang (5.1.02.01) senilai Rp. 40.980.000,-
2. Belanja Jasa (5.1.02.02) senilai Rp. 85.300.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas (5.1.02.04) senilai Rp. 273.720.000,-

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan adalah : Wilayah KPHL/KPHP Provinsi Sumatera Barat

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan dijadwalkan mulai Januari sampai dengan Desember 2023.

D. Pelaksana Kegiatan

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab Program | : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat |
| 2. Penanggung Jawab Kegiatan/KPA | : Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan |
| 3. PPTK | : Sub Koordinator Rehabilitasi Hutan dan Lahan |
| 4. Bendahara | : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat |
| 5. Sub Koordinator/Pelaksana | : Koordinator Pelaksana Pengendalian Perubahan Iklim |
| 6. Anggota/Pembantu Pelaksana | : Pelaksana Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan pelaksana unit kerja lain yang ditunjuk. |

III. MEKANISME PELAKSANAAN

Sub kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Tahun 2023 dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa "Swakelola". Dimana pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh unsur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Berikut tahapan pelaksanaan swakelola sub kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Tahun 2023.

1. Belanja Barang dilaksanakan melalui pembelian langsung.
2. Belanja Jasa dilaksanakan melalui pembelian dan pembayaran langsung.
3. Belanja Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan mempedomani petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Sebagai bukti pertanggungjawaban, pelaksana membuat laporan hasil pelaksanaan dan administrasi pendukung kegiatan lainnya seperti Surat Perintah Tugas, Daftar Pembayaran, Rincian, Kwitansi pembayaran, dll.

IV. METODA PELAKSANAAN

Sub kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Tahun 2023 mempunyai 2 (dua) sasaran pelaksanaan yang terdiri dari 1) Re-enumerasi Petak Ukur Permanen (PUP) dan 2) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (PDPI). Adapun metode pelaksanaan adalah sebagai berikut.

1. Re-enumerasi Petak Ukur Permanen (PUP)

Re-enumerasi Petak Ukur Permanen (PUP) dilaksanakan berpedoman Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 187/KEP/BSN/11/2011 tanggal 18 Nopember 2011 tentang Pengukuran dan Penghitungan Cadangan Karbon – Pengukuran Lapangan untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan (ground based forest carbon accounting) dan Penyusunan Persamaan Alometrik untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan Berdasar Pengukuran Lapangan (ground based forest carbon accounting) SNI : 7724 :11 dan SNI : 7725 : 11.

Berikut prosedur pelaksanaan Re-enumerasi Petak Ukur Permanen :

- a. persiapan
 - administrasi persuratan meliputi Surat Perintah Tugas, Surat Bantuan Tenaga, Surat Perintah Perjalanan Dinas dll;
 - peralatan kerja meliputi alat tulis, GPS, timbangan gantung, kompas, alat pengukur tinggi/panjang/lereng/diameter pohon, alat pengambil sampel tanah, gunting kecil/gergaji kecil dan Kamera;
 - bahan kerja meliputi peta kerja, blanko isian (kuisisioner dan/atau tally sheet data lapangan), label pohon, cat, dan kantong sampel.
- b. pelaksanaan
 - Tim yang ditugaskan berkoordinasi dengan pejabat instansi terkait.
 - Meminta petugas pendamping lapangan minimal satu orang dari staf KPH/pihak terkait.
 - Melaksanakan orientasi lapangan ke rencana lokasi pembuatan PUP.
 - Melakukan pengukuran dan identifikasi terhadap 10 PUP yang telah dibangun pada Tahun 2018, pengukuran yaitu serasah/tumbuhan bawah, pohon/kayu mati, akar/tanah dan atau bahan lain yang diperlukan.

- Melakukan uji ke laboratorium terhadap sampel setelah kembali dari lapangan.
 - Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.
- c. pelaporan
Penghitungan dan pengolahan data Biomassa dan cadangan karbon sesuai dengan juklak dilaporkan dalam laporan perjalanan dinas kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam mendukung pelaksanaan Pembuatan Petak Ukur Permanen akan dilaksanakan Focuss Group Discussion (FGD) Pengukuran Carbon yang dilaksanakan secara fullday dengan peserta dari tenaga teknis KPHL/KPHP wilayah Sumatera Barat. FGD pengukuran Carbon ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada tenaga teknis bagaimana metode pengukuran carbon sehingga kedepannya dapat menghitung cadangan carbon di masing-masing wilayah KPHL/KPHP.

2. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (PDPI) Tahun 2023

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (PDPI) dilaksanakan melalui Monev Implementasi REDD+; dan Focuss Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Carbon.

Berikut prosedur pelaksanaan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (PDPI) :

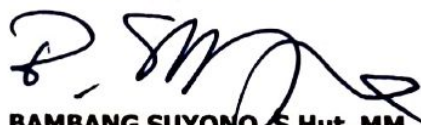
- a. persiapan
- administrasi persuratan meliputi Surat Pemohonan Pemateri, Surat Undangan, Surat Perintah Tugas, Surat Bantuan Tenaga, Surat Perintah Perjalanan Dinas dll;
 - peralatan kerja meliputi alat tulis, baliho/spaduk;
 - bahan kerja meliputi blanko isian (kuisisioner dan/atau tally sheet data lapangan), modul/materi.
- b. pelaksanaan
- Tim yang ditugaskan berkoordinasi dengan pejabat instansi terkait.
 - Mengumpulkan data hasil pelaksanaan implementasi REDD+ sesuai blanko isian;
 - Melakukan uji petik pelaksanaan implementasi REDD+ di lapangan.
 - Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.
- c. pelaporan
data hasil monev implementasi REDD+ disampaikan dalam laporan perjalanan dinas kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam mendukung pelaksanaan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim akan dilaksanakan Focuss Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Carbon yang dilaksanakan secara fullday dengan peserta dari masyarakat (Perhutanan Sosial) dan tenaga teknis wilayah KPHL/KPHP wilayah Sumatera Barat. FGD Pemanfaatan Carbon ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dan tenaga teknis wilayah tapak bagaimana mengantisipasi dampak perubahan iklim sehingga dapat meminimalisir efek negatif dari perubahan iklim akibat efek Gas Rumah Kaca.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Tahun 2023 ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan.

Kuasa Pengguna Anggaran

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan


BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM
NIP 19720907 199903 1 002

lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Tentang : Pelaksanaan Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Tahun 2023

Nomor :
Tanggal :

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
	BELANJA DAERAH					Rp. 400.000.000
1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000
1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 400.000.000
1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.920.000
1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.920.000
1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 2.414.000
	[#] RENUMERASI PETAK UKUR PERMANEN					Rp. 2.414.000
	Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					
	[-] Alat dan Bahan PUP (DBH)					
	cat Spesifikasi : cat minyak besi dan kayu, berat 1 kg, anti jamur	20 Kaleng	Kaleng	62.700	0	Rp. 1.254.000
	karung goni Spesifikasi : plastik	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 200.000
	paku Spesifikasi : 1/2, 1, 1.1/2, 2, 2.1/2 inci	10 Kg	Kg	20.000	0	Rp. 200.000
	plat seng alluminium Spesifikasi : 90 x 180 cm	20 Lembar	Lembar	38.000	0	Rp. 760.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.260.000
	[#] PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM					Rp. 350.000
	[-] souvenir FGD					
	Pena Spesifikasi : Tinta Jel	70 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 350.000
	[#] RENUMERASI PETAK UKUR PERMANEN					Rp. 1.910.000
	Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (DBH)					
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	10 Pack	Pack	99.800	0	Rp. 998.000
	Stop Map Spesifikasi : 5002	5 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp. 912.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.935.000
	[#] PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM					Rp. 4.635.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	45 Rim	Rim	47.000	0	Rp. 2.115.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	40 Rim	Rim	63.000	0	Rp. 2.520.000
	[#] RENUMERASI PETAK UKUR PERMANEN					Rp. 3.300.000
	Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					

	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (DBH)					
	Kertas Hvs Spesifikasi : 14 70 gr	30 Rim	Rim	63.000	0	Rp. 1.890.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	30 Rim	Rim	47.000	0	Rp. 1.410.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.738.500
	[#] PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM					Rp. 1.482.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1428 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 357.000
	[-] Penggandaan dokumen (DBH)					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	4500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.125.000
	[#] PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DBH)					Rp. 85.000
	[-] Jilid Laporan Kegiatan					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	5 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp. 85.000
	[#] RENUMERASI PETAK UKUR PERMANEN Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 3.001.500
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	800 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 200.000
	[-] Belanja Penggandaan (DBH)					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	5046 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.261.500
	penggandaan peta digital a0 Spesifikasi : ukuran a0	20 Lembar	Lembar	77.000	0	Rp. 1.540.000
	[#] RENUMERASI PETAK UKUR PERMANEN (DBH) Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 170.000
	[-] Penjilidan Laporan (DBH)					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp. 170.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.781.500
	[#] PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DBH)					Rp. 1.508.000
	[-]					
	catridge printer Spesifikasi : 28 colour	3 Unit	Unit	288.000	0	Rp. 864.000
	catridge printer Spesifikasi : 21 black	2 Unit	Unit	322.000	0	Rp. 644.000
	[#] RENUMERASI PETAK UKUR PERMANEN (DBH) Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 3.273.500
	[-] Belanja Bahan Komputer (DBH)					
	catridge printer Spesifikasi : 21 black	5 Kotak	Unit	322.000	0	Rp. 1.610.000
	catridge printer Spesifikasi : 28 colour	5 Kotak	Unit	288.000	0	Rp. 1.440.000
	tinta printer Spesifikasi : [bp-c810k] - black pigment (merchant)	5 Kotak	Unit	44.700	0	Rp. 223.500

1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 990.000
	[#] RENUMERASI PETAK UKUR PERMANEN Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 990.000
	[-] Sepatu Lapangan Renumerasi PUP (DBH)					
	sepatu lapangan	6 Pasang	Pasang	165.000	0	Rp. 990.000
	Spesifikasi : boot karet					
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 6.150.000
	[#] PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM					Rp. 6.150.000
	[-] FGD Mitigasi Perubahan Iklim					
	buku agenda Spesifikasi : cover pu leather, ukuran kertas a5, isi 100 halaman	20 Buku	Eksemplar	55.000	0	Rp. 1.100.000
	[-] FGD Mitigasi Perubahan Iklim (DBH)					
	tumbler /smart cup Spesifikasi : tumbler/botol minum dengan indikator suhu, bahan s...	20 Orang	Pcs	115.000	0	Rp. 2.300.000
	[-] FGD Pemanfaatan Carbon					
	buku agenda Spesifikasi : cover pu leather, ukuran kertas a5, isi 100 halaman	50 Buku	Eksemplar	55.000	0	Rp. 2.750.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 451.000
	[#] RENUMERASI PETAK UKUR PERMANEN (DBH) Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 451.000
	[-] Belanja Obat-obatan (DBH)					
	balsem Spesifikasi : 18 gram, 12 botol	1 Lusin	Lusin	66.000	0	Rp. 66.000
	betadin Spesifikasi : 45 ml botol	10 Botol	Botol	25.300	0	Rp. 253.000
	plester besar Spesifikasi : gulung	1 Lusin	Lusin	132.000	0	Rp. 132.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.900.000
	[#] PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM					Rp. 1.560.000
	[-]					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	30 Kotak	Kotak	21.000	0	Rp. 630.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	30 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp. 930.000
	[#] RENUMERASI PETAK UKUR PERMANEN (DBH) Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 2.340.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat (DBH)					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	45 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp. 1.395.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	45 Kotak	Kotak	21.000	0	Rp. 945.000

5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 7.360.000
	[#] PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM					Rp. 1.840.000
	[-] Makan Buruh Monev REDD+					
	Makan/Minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali x 10 Lokasi	Per Bungkus	23.000	0	Rp. 1.840.000
	[#] RENUMERASI PETAK UKUR PERMANEN Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 5.520.000
	[-] Makan Buruh Renumerasi PUP					
	Makan/Minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	240 Orang	Per Bungkus	23.000	0	Rp. 5.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 85.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.900.000
	[#] PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DBH)					Rp. 10.900.000
	[-] FGD Mitigasi Perubahan Iklim (DBH)					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 2.700.000
	[-] FGD Pemanfaatan Carbon (DBH)					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 30.400.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 30.400.000
	[#] PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM					Rp. 30.400.000
	[-] Biaya Fullboard FGD Pemanfaatan Carbon					
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (Setingkat Eselon III / Masyarakat) Spesifikasi : Fullboard	50 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 25.000.000
	[-] FGD Mitigasi Perubahan Iklim					
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (Setingkat Eselon III / Masyarakat) Spesifikasi : Fullday	30 Paket	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 17.600.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta					Rp. 17.600.000
	[#] RENUMERASI PETAK UKUR PERMANEN (DBH) Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 17.600.000

	[-] Belanja Jasa Pembuatan Peta Digital					
	biaya jasa pembuatan Peta Digital Spesifikasi : Peta Isi Lengkap	20 Lembar	Lembar	880.000	0	Rp. 17.600.000
1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 8.900.000
1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 8.900.000
	[#] PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM					Rp. 8.900.000
	[-] FGD Pemanfaatan Carbon					
	Pengganti Transport Peserta untuk Bimtek dan sejenisnya (Non PNS/2 hari) Spesifikasi : Zona A (Kegiatan di Padang)	6 Orang	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 1.800.000
	Pengganti Transport Peserta untuk Bimtek dan sejenisnya (Non PNS/2 hari) Spesifikasi : Zona B (Kegiatan di Padang)	6 Orang	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 2.700.000
	Pengganti Transport Peserta untuk Bimtek dan sejenisnya (Non PNS/2 hari) Spesifikasi : Zona C (Kegiatan di Padang)	6 Orang	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp. 3.000.000
	Pengganti Transport Peserta untuk Bimtek dan sejenisnya (Non PNS/2 hari) Spesifikasi : Mentawai (Kegiatan di Padang)	2 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 1.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 273.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 273.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 273.720.000
	[#] PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DBH)					Rp. 128.190.000
	[-] FGD Mitigasi Perubahan Iklim (DBH)					
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar kantor (Residence/didalam Kota) Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] FGD Pemanfaatan Carbon (DBH)					
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar kantor (Residence/didalam Kota) Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 4.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Mitigasi Perubahan Iklim ke Jakarta					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 760.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000

Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 1 Kali	Orang / pp	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 3.968.000
Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monev REDD+ di Wilayah Kab. Kep. Mentawai					
Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	6 Orang / PP	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 1.500.000
Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbang Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp. 3.800.000
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 5.200.000
Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 2.700.000
Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 600.000
Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 5.700.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monev REDD+ di Wilayah KPH Daratan					
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Agam	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp. 450.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	170.000	0	Rp. 510.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pesisir Selatan	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp. 720.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Sijunjung	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp. 450.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp. 600.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp. 600.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp. 360.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp. 600.000
Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbang Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 2 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 23.400.000

Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 2 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp. 17.100.000
Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 3 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 30.780.000
[-] Transportasi Narasumber FGD dari Jakarta					
Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 380.000
Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang	Orang / pp	2.952.000	0	Rp. 2.952.000
[-] Transportasi Peserta FGD					
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	2 Orang x 2 Kali	Orang / pp	170.000	0	Rp. 680.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pesisir Selatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / pp	120.000	0	Rp. 480.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / pp	200.000	0	Rp. 800.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Agam	2 Orang x 2 Kali	Orang / pp	150.000	0	Rp. 600.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Sijunjung	2 Orang x 2 Kali	Orang / pp	150.000	0	Rp. 600.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	2 Orang x 2 Kali	Orang / pp	200.000	0	Rp. 800.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	2 Orang x 2 Kali	Orang / pp	200.000	0	Rp. 800.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok	2 Orang x 2 Kali	Orang / pp	120.000	0	Rp. 480.000
[#] RENUMERASI PETAK UKUR PERMANEN Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 122.280.000
[-] Perjalanan dinas Dalam Rangka Renumerasi PUP					
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Sijunjung	3 Orang	Orang / pp	150.000	0	Rp. 450.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	3 Orang	Orang / pp	200.000	0	Rp. 600.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pesisir Selatan	3 Orang	Orang / pp	120.000	0	Rp. 360.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Tanah Datar	3 Orang	Orang / pp	140.000	0	Rp. 420.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Agam	3 Orang	Orang / pp	150.000	0	Rp. 450.000
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Padang Pariaman	3 Orang	Orang / pp	110.000	0	Rp. 330.000

	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok	3 Orang	Orang / PP	120.000	0	Rp. 360.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	3 Orang	Orang / PP	200.000	0	Rp. 600.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	3 Orang	Orang / PP	200.000	0	Rp. 600.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	3 Orang	Orang / PP	170.000	0	Rp. 510.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbang Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 3 Hari x 10 Lokasi	Orang / Hari	950.000	0	Rp. 28.500.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbang Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 3 Hari x 10 Lokasi	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 39.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Hari x 10 Lokasi	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 4.500.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Renumerasi PUP (DBH)						
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 4 Hari x 10 Lokasi	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 45.600.000
[#] RENUMERASI PETAK UKUR PERMANEN (DBH)						Rp. 23.250.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)						
[-] perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi REDD+						
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.536.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 1.140.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 8.856.000
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 3.968.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.770.000
Grand Total :						Rp. 400.000.000

Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan


BAMBANG SUYONO, S.Hut, M.M
NIP. 197209071993031002

Nomor :
 Tanggal :

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN
 Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
 Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan
 Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	TRIMULAN I			TRIMULAN II			TRIMULAN III			TRIMULAN IV		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
5	BELANJA DAERAH	400.000.000	-	34.727.500	64.474.000		46.552.000	49.192.000	46.492.000	65.892.000	45.190.000	998.500	-	
5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-	34.727.500	64.474.000		46.552.000	49.192.000	46.492.000	65.892.000	45.190.000	998.500	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-	34.727.500	64.474.000		46.552.000	49.192.000	46.492.000	65.892.000	45.190.000	998.500	-	
5.1.02.01	Belanja Barang	40.980.000	-	19.891.500	4.090.000		1.472.000	3.872.000	1.472.000	4.872.000	2.340.000	998.500	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.980.000	-	19.891.500	4.090.000		1.472.000	3.872.000	1.472.000	4.872.000	2.340.000	998.500	-	
998.500.5.1.02.01.01	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	2.414.000	-	2.414.000									-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.250.000	-	1.910.000	350.000								-	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.935.000	-	7.935.000									-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.738.500	-	1.100.000				1.100.000				1.540.000	-	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.781.500	-	4.781.500									-	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas	990.000	-	990.000									-	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/ Cendera Mata	6.150.000	-	2.750.000								3.400.000	-	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	451.000	-	451.000									-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000	-	1.300.000				1.300.000					-	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.360.000	-	1.472.000				1.472.000				1.472.000	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	85.300.000	-	42.100.000									-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.400.000	-	8.200.000									-	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.900.000	-	8.200.000								2.700.000	-	
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.500.000	-									1.500.000	-	

Kode Rekening	Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Oktr	Nov	Des
S.1.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	16.000.000	-	-	-	-	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	-	-	-	-
S.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.400.000	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.400.000	-
S.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	30.400.000	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.400.000	-
S.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	17.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	17.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.1.02.02.12	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Diligt	8.900.000	-	-	8.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Tennis	8.900.000	-	-	8.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	273.720.000	-	14.836.000	18.284.000	-	41.880.000	42.120.000	41.820.000	41.820.000	49.710.000	23.250.000	-	-
S.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	273.720.000	-	14.836.000	18.284.000	-	41.880.000	42.120.000	41.820.000	41.820.000	49.710.000	23.250.000	-	-
S.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	273.720.000	-	14.836.000	14.836.000	-	-	41.880.000	42.120.000	41.820.000	41.820.000	49.710.000	-	-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG PERBULAN			-	34.777.900	64.474.000	-	46.552.000	49.197.000	46.492.000	46.492.000	55.982.000	45.150.000	598.500	-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG PERTRIWULAN			99.201.500			95.744.000			153.866.000			46.138.500		

Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

B. Bambang Suyono

BAMBANG SUYONO, S.HUT, M.M
NIP. 197209071993031002